

Penerapan Demokrasi Pancasila Di Indonesia

SD. Fuji Lestari Hasibuan, Afifah Muffarohah
Fakultas Hukum Umitra
fujilestari@umitra.ac.id, afifah@gmail.com

ABSTRAK

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana sejarah dan proses berkembangnya serta penerapan Demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu menggunakan bahan kepustakaan atau literatur-literatur.

Konsep demokrasi Pancasila tidak bersumber dari paham individualisme yang berkembang di barat meski tak bisa di tampik nilai-nilai liberal yang membentuk demokrasi di barat seperti kesetaraan hak warga negara, kebebasan berpendapat sebagai pilar demokrasi yang utama berpengaruh kuat terhadap pengayaan demokrasi Pancasila.

kata kunci : demokrasi, pancasila

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau, mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat, penguasa di bawah pengawasan rakyat. Dalam sejarah ketatanan republik indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi mengalami fluktuasi (pasang surut). Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa indonesia adalah bagaimana upaya meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat yang plural.¹

Demokrasi di Indonesia telah semakin berkembang seiring dengan pergantian pemimpin serta pergantian masa, mulai dari masa penjajahan, orde lama sampai kepada reformasi sekarang. Demokrasi kini telah akrab dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Penerapan demokrasi pun telah merambat sampai hampir ke semua aspek, tak terkecuali pada perpolitikan di Indonesia. Karena fungsinya yang begitu sangat dekat dengan keseharian maka demokrasi kini semakin gencar di pelajari.²

Hakikat demokrasi sebagai suatu system bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal. Pertama, pemerintah dari rakyat (*Government of the people*), kedua, pemerintah oleh rakyat (*Government by people*), ketiga, pemerintahan untuk rakyat (*Government for people*), jadi hakikat suatu pemerintahan yang demokratis bila ketiga hal diatas dapat dijalankan dan ditegakkan dalam tata pemerintahan. Salah satu corak demokrasi yang diterapkan di Indonesia yakni Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.³

Dalam demokrasi pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas. Dominasi mayoritas adalah kelompok besar yang menguasai segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengabaikan kelompok yang kecil. Tirani minoritas adalah kelompok kecil yang menguasai segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengabaikan kelompok besar.⁴

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, makapermasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana sejarah dan proses berkembangnya serta penerapan Demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia.

¹ Maulana arafat lubis, pembelajara PPKn di SD/MI (Medan: Akasha Sakti 2018), Hlm.50- 52

²Nadrilun, mengenal lebih dekat demokrasi di Indonesi (jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2012), Hlm 32

³ Lihat Mohammad Hatta,"Indonesia Merdeka" dalam karya lengkap Bung Hatta.Buku I: Kebangsaan dan Kerakyatan (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998), hlm. 87

⁴<https://aprileopgsd.wordpress.com/tag/makalah-sistem-pemerintahan-di-indonesia/>

PEMBAHASAN

Dinegara kita, prinsip-prinsip demokrasi telah disusun sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, meski harus dikatakan baru sebatas demokrasi prosedural, dalam proses pengambilan keputusan lebih mengedepan voting ketimbang musyawarah untuk mufakat, yang sejatinya merupakan azas asli demokrasi Indonesia. Praktek demokrasi ini tanpa dilandasi mental state yang berakar dari nilai-nilai luhur bangsa merupakan gerakan omong kosong belaka. Konsep demokrasi pancasila digali dari nilai masyarakat asli Indonesia dengan nilai-nilai yang melekat kepadanya, seperti desa demokrasi, rapat kolektivisme, musyawarah, mupakat, tolongmenolong dan istilah-istilah lain yang berkaitan dengan itu. Tujuannya, memberikan pendasaran emperis sosiologis tentang konsep demokrasi yang sesuai dengansifat kehidupan masyarakat asliIndonesia, bukan sesuatu yang asing yang bersal dari barat dan dipaksakan pada realitas kehidupan bangsa Indonesia.⁵

Masyarakat asli yang dimaksudkan disini adalah bentuk kehidupan masyarakat yang sudah berlangsung dipulau-pulau di nusantara sejak berabad-abad yang lalu dan yang tersusun dari satuan-satuan kehidupan yang terkecil yang berbeda-beda seperti desa di Jawa, nagari di Sumatra barat, pekon dilampung atau subak di Bali. Masyarakat asli ini memiliki seperangkat nilai mental dan moral yang bersifat homogen, struktural dan kolektif, yang kesemuanya memiliki sistem budaya sendiri dan berlangsung secara demokratis, yaitu demokrasi secara langsung sebagaimana terdapat dinegara-negara kota di Yunani kuno 25 abad yang lalu. Proses metamorphosis nilai-nilai demokrasi yang digali dari kearifan budaya Indonesia tersebut mengalami beberapa priderisasi dalam proses implementasinya sebagai suatu keniscayaan, dan tahapan tersebut dapat dilihat dalam uraian berikut ini. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam lima priode :

1. Pelaksanaan demokrasi masa revolusi 1945-1950.
2. Pelaksanaan demokrasi masa orde lama.
 - a. Masa demokrasi liberal 1950-1959.
 - b. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959-1965.
3. Pelaksanaan demokrasi masa orde baru tahun 1966-1998.
4. Pelaksanaan demokrasi masa transisi tahun 1998-1999.
5. Pelaksanaan demokrasi masa reformasi tahun 1999 sampai sekarang.⁶

Indonesia mengadopsi sistem demokrasi sejak proklamasi. Sistem demokrasi seperti apa yang diterapkan di Indonesia, tentu memerlukan penjelasan yang lebih detail. Sistem demokrasi meliputi berbagai macam jenis. Sebagai contoh, ada demokrasi liberal dan ada demokrasi pancasila.⁷

⁵ Yudi Latif, Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila (Jakarta; Pustaka Gramedia, 2011), hlm. 383.

⁶ Suleman, Zulfikri, Demokrasi Untuk Indonesia, Jakarta: Kompas, 2010.

⁷<http://sosiologis.com/sistem-pemerintahan-indonesia>

Demokrasi Pancasila pada hakikatnya merupakan norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, bagi setiap warga negara Republik Indonesia, organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun di daerah. Demokrasi Pancasila memiliki prinsip-prinsip yang berlaku, seperti:

1) Kebebasan atau persamaan (Freedom/ Equality). Kebebasan/persamaan adalah dasar demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa pembatasan dari penguasa. Dengan prinsip persamaan semua orang dianggap sama, tanpa dibedabedakan dan memperoleh akses dan kesempatan bersama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Kebebasan yang dikandung dalam demokrasi Pancasila ini tidak berarti Free Fight Liberalism yang tumbuh di Barat, tapi kebebasan yang tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain.

2) Kedaulatan Rakyat (people's Sovereignty). Dengan konsep kedaulatan rakyat, hakikat kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal; yaitu, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan sangatlah kecil, dan kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan lebih terjamin. Perwujudan lain dari konsep kedaulatan adalah adanya pengawasan oleh rakyat. Pengawasan dilakukan karena demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati penguasa.⁸

Menurut *Hatta*, Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin sila-sila yang lain. Seperti halnya sila kerakyatan atau demokrasi, Hatta yakin bahwa demokrasi akan hidup selama-lamanya di bumi Indonesia, sekalipun akan mengalami pasang naik dan pasang surut. Menurut Hatta, sumber demokrasi atau lebih tegasnya demokrasi sosial, di Indonesia ada tiga; Pertama, sosialisme Barat yang membela prinsip-prinsip humanisme, dan prinsip ini juga dipandang sebagai tujuan. Kedua, ajaran Islam yang memerintahkan kebenaran dan keadilan Tuhan dalam bermasyarakat. Ketiga, pola hidup dalam bentuk kolektivisme sebagaimana terdapat di desa-desa di Indonesia. Ketiga sumber inilah yang akan menjamin kelestarian demokrasi di Indonesia, sehingga Hatta berkeyakinan bahwa demokrasi di Indonesia mempunyai dasar yang kukuh.⁹

Demokrasi Pancasila juga diartikan sebagai demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam menganut asas demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat, dimana keluhuran manusia sebagai makhluk Tuhan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan diakui, ditaati dan dijamin atas dasar kenegaraan Pancasila. Kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa disebut sistem demokrasi perwakilan (representative democracy) atau demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Dalam praktek, pihak yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Agar wakil-wakil rakyat dapat bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (general election). Dengan demikian, pemilihan umum itu tidak lain merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis.¹⁰

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta; Sinar Grafika, 2011), hlm. 198-234

⁹ Mohamad Hatta, *Menuju Negara Hukum* (Jakarta: Idayu Press, 1977), hlm.17.

¹⁰ *Ibid* hlm. 414.

Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Kata “demokrasi” seiring waktu memiliki sangat banyak pengertian. Namun, diantara banyaknya pengertian yang berbeda terdapat juga sejumlah persamaan penting yang menunjukkan universalitas konsep demokrasi berdasarkan kriteria-kriteria yang menjadi cerminan perwujudan konsep tersebut.

Konsep demokrasi Pancasila tidak bersumber dari paham individualisme yang berkembang di barat meski tak bisa di tampik nilai-nilai liberal yang membentuk demokrasi di barat seperti kesetaraan hak warga negara, kebebasan berpendapat sebagai pilar demokrasi yang utama berpengaruh kuat terhadap pengayaan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang dimunculkan adalah demokrasi berdasarkan paham kebersamaan dan kekeluargaan, substansi dari demokrasi model ini adalah sikap kritis terhadap kebijakan penguasa, musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan politik dan kebiasaan tolong menolong atau gotong royong.

Praktek demokrasi Pancasila di Indonesia itu bercorak pada nasionalisme religius bukan kepada nasionalisme sekuler. Hal ini dapat kita lihat pada sikap sila pertama Pancasila yang mengakomodasi nilai-nilai Ketuhanan dalam ideologi Negarasebagai landasan dasar berbangsa dan bernegara.

Daftar Pustaka

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta; Sinar Grafika, 2011)

Lihat Mohammad Hatta, “Indonesia Merdeka” dalam karya lengkap Bung Hatta. Buku I:
Kebangsaan dan Kerakyatan (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998)

Mohamad Hatta, *Menuju Negara Hukum* (Jakarta: Idayu Press, 1977)

Jurnal Pro Justitia (JPJ)

ISSN: 2745 - 8539

Vol. 3, No. 2, Agustus 2022

Nadrilun, mengenal lebih dekat demokrasi di Indonesia, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2012.

Suleman, Zulfikri, Demokrasi Untuk Indonesia (Jakarta: Kompas, 2010)

Yudi Latif, Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila (Jakarta; Pustaka Gramedia, 2011).

<http://sosiologis.com/sistem-pemerintahan-indonesia>

<https://aprileopgsd.wordpress.com/tag/makalah-sistem-pemerintahan-di-indonesia/>

jurnal demokrasi pancasila sebagai model demokrasi yang rasional dan spesifik, Roch Eddy Prabowo

jurnal Memaknai Demokrasi Pancasila, Apiek Gandamana Dosen Prodi Pgsd Fip Unimed

jurnal Perkembangan System Pemerintahan Presidensial Di Indonesia, Putri Ismairifa.